

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk. Ke-3, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Arief, Irsan, *Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2022.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Bemmelen, Mr. JM. Van, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Harahap, Ayuningtyas, *Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta, 2023.

- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Bandung, 2006.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Karsona, Agus Mulya, *Pengertian Korupsi dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011.
- Lopa, Baharudin, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. PT Kipas Putih Aksara, Jakarta, 2016.
- Lotulung, Paulus Effendie, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Bidang Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta, 1998.
- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, ctk. Ke-3, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan*, ctk. Ke-5, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Buku Litera, Yogyakarta, 2017.



Purnama, I Ketut Adi, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia Inggris*, Aneka, Semarang, 1977.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, ctk. Ke-8, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Ramadhani, Rizki, *Problematika Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Adab, Indramayu, 2024.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986;

Wade, H.W.R., *Administrative Law: Fifth Edition*, English Language Book Society, Oxford University Press, Oxford, 1982.

Jurnal

American University Law Review, Vol. 54, Washington, 2005.

Harvard Law Review, Edisi No. 5 Vol. 75, Cambridge, 1962.

Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 102 No. 3, 2024.

Jurnal Dharmasisya, Edisi No. 2, Vol. 2, 2022.

Jurnal Fitrah, Vol. 08, No. 1, 2014.

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 4 Vol. 19, 2012

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020.

Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 27, No. 4, 2014.

Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No. 1, 2024.

Jurnal Refleksi Hukum Vol. 9, No. 2, 2015.

Jurnal Warta, Edisi No. 59, 2019,

Lex Crimen, Edisi No. 10 Vol. 13, 2020.

Ohio State Journal of Criminal Law, Vol. 5, Ohio, 2009.

Makalah

Kurniawan, Septian Virgananda, “Konflik Kewenangan Penyidik antara Polri dan KPK dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Alat Simulator SIM di Korlantas Polri”, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/Pid.Sus/2016

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk.

Putusan/Resolusi Organisasi Internasional/Konvensi Internasional;

United Nations Convention on Against Corruption, 2003.

Data Elektronik

<https://nasional.sindonews.com/read/1192571/18/kekeliruan-dalam-menyikapi-uu-tipikor1693793361>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pertarungan-wewenang-polisi-dan-jaksa-dalam-menyidik-perkara-korupsi--hol18538/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pertarungan-wewenang-polisi-dan-jaksa-dalam-menyidik-perkara-korupsi--hol18538/>

<https://www.rri.co.id/hukum/874301/peradilan-sesat-sejarah-dan-definisinya#:~:text=Istilah%20peradilan%20sesat%20berasal%20dari%20kalimat%20dalam,yang%20berarti%20%E2%80%9Ckesesatan%20hakim%E2%80%9D%20dalam%20Bahasa%20Indonesia.&text=Dalam%20sejarah%20peradilan%20sesat%20di%20Indonesia%2C%20ditemukan,fakta%20yang%20didapatkan%20dari%20hasil%20rekayasa%20penyidik.>

Sumber Lain

Catatan pribadi Peneliti, Disampaikan pada kelas Hukum Pidana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh Aroma Elmina Martha, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, di Yogyakarta, 20 Maret 2025;

Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2023.

Ismail, Maqdir dkk, Permohonan Pengujian Materi Muatan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 (berikut Penjelasannya) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teregister oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 tertanggal 03 Oktober 2024;

Lexique de Termes Yuridiques, Edisi ke-21, DALLOZ, Paris, 2014;

Surat Dakwaan Nomor PDS-01/M.4.14/Ft.1/02/2025 tertanggal 28 Februari 2025.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012.

Tim Buku Pedoman Penelitian Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), Buku Pedoman Penelitian Tugas Akhir, Pedoman Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa, Edisi Revisi 1.0, Program Studi Hukum Program Sarjana, 2020.

Tim Laporan Tahunan KPK, Laporan Tahunan KPK 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2023.

Tim Penyusun Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Buku Kedua Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2023.

